



## WTP Pemprov Ada Kerjasama Berbagai Pihak

**Borneo Tribune, Pontianak**

Badan Pemeriksa Keuangan RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2012. Keputusan tersebut berkat keberhasilan

an Pemerintah Provinsi Kalbar dalam melaporkan pengelola keuangan daerah dengan baik benar. Hal itu, bisa terwujud berkat adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak terutama anggota Dewan yang selalu memberi

kan masukan yang positif berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, adanya perhatian penuh dari para kepala SKPD yang secara benar dan jujur dalam mengelola keuangan serta memberikan laporannya dengan baik.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, ketika menyampaikan laporan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plapond Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan

...Ke Halaman -11

## WTP Pemprov Ada Kerjasama Berbagai Pihak

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (16/7).

Predikat WTP Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tersebut harus tetap dipertahankan, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Kalbar kearah yang lebih baik, tentu semuanya itu harus menjadi tekad kita mewujudkannya," ungkap Christiandy.

Perubahan APBD Pemprov tahun 2013 dari sisi Pendapatan semula ditargetkan sebesar Rp.3,25 triliun bertambah sebesar Rp.43,51 milyar sehingga menjadi Rp.3,29 triliun dengan rincian. Pendapartan Asli Daerah semula sebesar Rp.1,35 triliun bertambah sebesar 11,93 milyar sehingga menjadi 1,36 triliun. Bertambahnya PAD bersumber

dari bertambahnya retribusi daerah sebesar 1,25 milyar, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp. 4 milyar dan laian lain PAD yang sah sebesar Rp. 6,67 milyar. Dana Perimbangan semula sebesar Rp.1,36 triliun bertambah sebesar 31,59 milyar sehingga menjadi 1,39 triliun.

Dari sisi Belanja semua ditargetkan sebesar Rp.3,34 triliun bertambah sebesar Rp.115,77 milyar sehingga menjadi Rp. 3,45 triliun. Belanja tidak langsung semula dialokasikan sebesar Rp. 1,72 triliun bertambah sebesar Rp.98,32 milyar sehingga menjadi Rp.1,82 triliun. Sedangkan belanja langsung semula dialokasikan sebesar Rp.1,62 triliun bertambah sebesar Rp.17,45 milyar sehingga menjadi Rp.1,63 triliun.

Sisi Pembiayaan, penerimaan pembiayaan semula dianggarkan sebesar Rp.150

milyar bertambah sebesar Rp.72,26 milyar sehingga menjadi 222,26 milyar, yang bersumber dari sisi lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya (SILPA) tahun 2012, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 60 milyar.

Mengingat sisa waktu yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan APBD tahun 2013 relatif hanya efektif empat bulan, maka harus dibatasi terhadap kegiatan fisik/konstruksi yang bersekala besar, semuanya itu diarahkan pada belanja tidak langsung maupun Belanja Langsung yang terkait dengan pelayanan publik, peningkatan kapasitas pemerintah atau kegiatan lainnya yang dinilai strategis dan prioritas," tegasnya. (Nasir/Humas) □